



Standardisasi Produksi Agroindustri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Sesaot di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

Addinul Yakin*¹, Amiruddin¹, L. Sukardi¹, Halimatus Sya'diyah¹, Pande Komang Suparyana¹

¹(Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

Article history

Received: 6 Juni 2022

Revised: 21 Juni 2022

Accepted: 23 Juni 2022

*Corresponding Author:

Addinul Yakin,
Program Studi Agribisnis,
Fakultas Pertanian
Universitas Mataram,
Mataram, Indonesia;
Email:
addinul_yakin@unram.ac.id

Abstract: Management and utilization of forest areas does not only focus on environmental conservation, but also socio-economic aspects. The potential of non-timber forest products (NTFPs) from the Sesaot forest area can be developed through a value-added process by business actors who currently do not all have home industry production permits. The activity to facilitate standardization of processed products has been carried out in Sesaot Village, Narmada District, West Lombok Regency for 13 (thirteen) business actors, both groups and individuals. A series of activities carried out include identification of activity targets, coordination with related agencies, and facilitating and mentoring. Based on the results of the activity implementation, it can be concluded as follows: (1) The implementation of the activity has been going well and smoothly, (2) This activity has improved the cognitive and affective aspects of the participants as evidenced by the fulfillment of the requirements for the issuance of PIRT, (3) This activity has become a vehicle for the dissemination of research results at the University of Mataram to the user community, (4) dynamic and complementary relationships between universities and the community as well as other related parties need to be developed continuously. Based on the results of the activity implementation, some suggestions are given as follows: (1) Micro and Small Business Actors (UMK) can utilize the acquired knowledge and skills to better manage their business to improve their economic welfare, (2) To facilitate participants, namely UMK managers can meet all the requirements needed for the issuance of PIRT, (3) in connection with this facilitation activity can be continued with the halal certification process for products that have obtained PIRT.

Keywords: processed products; value-added; nature tourism; environment; tourist; dissemination

Abstrak: Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan tidak hanya fokus pada aspek pelestarian lingkungan, tetapi juga sosial ekonomi. Potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) di sekitar kawasan hutan Sesaot bisa dikembangkan melalui proses nilai tambah oleh pelaku usaha yang saat ini belum semuanya memiliki ijin produksi industri rumah tangga. Kegiatan fasilitasi standardisasi produk olahan ini telah dilaksanakan di desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat terhadap 13 (tiga belas) pelaku usaha baik kelompok maupun perseorangan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi sasaran kegiatan, koordinasi dengan dinas terkait, dan fasilitasi dan pendampingan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Kegiatan telah berlangsung dengan baik dan lancar, (2) Kegiatan ini telah meningkatkan aspek kognitif dan afektif dari peserta terbukti dengan adanya pemenuhan syarat-syarat untuk diterbitkan PIRT, (3) Kegiatan ini telah menjadi wahana desiminasi hasil penelitian di universitas Mataram kepada masyarakat pengguna, (4) hubungan yang dinamis dan saling mengisi antara perguruan tinggi dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya perlu dikembangkan terus. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan maka diberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh untuk mengelola usaha dengan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, (2) Kepada peserta fasilitasi yaitu pengelola UMK dapat memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan PIRT, (3) dalam kaitan dengan kegiatan fasilitasi ini bisa dilanjutkan dengan proses sertifikasi halal bagi produk-produk yang telah memperoleh PIRT.

Kata kunci: produk olahan; nilai tambah; wisata alam; lingkungan; wisatawan; diseminasi

PENDAHULUAN

Hutan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sekitar hutan. Untuk itu, kebijakan kehutanan harus benar-benar ditujukan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yang bertumpu pada kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan antara lain dengan cara memperluas akses masyarakat atas hutan (Aji, dkk. 2015; Hasan dan Yumantoko, 2016). Peran hutan sebagai penyangga kehidupan (sosial, ekonomi, dan lingkungan) ini sangat penting, sehingga pengelolannya dilakukan dengan cermat. Selain itu, pengelolaan juga mempertimbangkan berbagai faktor agar dapat terus menjamin keberlanjutan sistem kehidupan tersebut (Dephut, 2009, Yakin dan Othman, 2003, Yakin, 2015, Yakin, dkk., 2016).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kehutanan, namun juga merupakan tanggungjawab sektor lain yang terkait. Dari segi yuridis Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menekankan pentingnya peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna (Menhut, 2011). Yakin, dkk (2016) menemukan bahwa keberadaan HKm di Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, misalnya, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Kawasan hutan lindung Sesaot mempunyai luas sekitar 5.999,2 hektar yang 57 persen merupakan hutan alami dan sisanya (43 persen) merupakan hutan buatan. Seluas 5.935 hektar merupakan hutan lindung dan sisanya (64,2 hektar) termasuk hutan kawasan wisata. Selain itu, Desa Sesaot bersama Desa Pakuan dan Buwun Sejati merupakan kawasan destinasi wisata yang berkelanjutan sehingga diperlukan inovasi dan berkreasi dalam penataannya. Selain itu, Dinas Pariwisata Propinsi NTB ingin menjadikan desa Sesaot sebagai "Kampung kreatif" sebagai upaya untuk menata kawasan wisata, mendorong tumbuhnya usaha kecil menengah (UKM) melalui kreativitas, inovasi dan usaha di masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan desa wisata.

Sebelum tahun 1982 hutan Sesaot merupakan hutan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), namun berubah status menjadi hutan lindung yaitu pada tahun 1982. Perubahan status hutan Sesaot menjadi hutan lindung sebenarnya membuat ruang pengelolaan hutan bagi masyarakat menjadi terbatas pada zona penyangga saja. Namun, model pengelolaan kawasan hutan tersebut kemudian menjadi inspirasi munculnya konsep pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Konsep pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada kawasan Hutan Sesaot diuji coba pada tahun 1995 dengan luas hutan 25 hektar. Uji coba tersebut dievaluasi cukup berhasil dalam konservasi hutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang menjadikan masyarakat sebagai petani HKm, sehingga pemerintah menambah luas areal pengelolaan HKm menjadi 236 hektar. Sampai saat ini sudah terdapat 185 ha kawasan yang sudah mendapatkan izin pengelolaan melalui skema HKm (Hutan Kemasyarakatan) dengan ditanami beberapa jenis komoditi buah sebesar 30% dari total luasan kawasan hutan dan 70% ditanami beberapa jenis pepohonan tegak seperti mahoni, sengon dan sebagainya (Suharianti, 2018).

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan tidak hanya fokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga harus memerhatikan sosial ekonomi masyarakat. Kepentingan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan harus berjalan secara simultan. Potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) khususnya dari kawasan agroforestri atau Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah sangat besar tetapi yang melalukan proses nilai tambah masih relatif sedikit dan masih perlu dikembangkan untuk bisa bersaing produk olahan lainnya. Dari hasil penjualan HHBK itu, lebih banyak dinikmati oleh pengepul. Masyarakat hanya menjadi penyedia produk. Mereka jauh dari pengetahuan tentang peningkatan nilai tambah produk. Dalam perkembangan terakhir, dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pengelola HKm melalui proses peningkatan nilai tambah melalui kegiatan agroindustri yaitu pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) menjadi produk-produk olahan untuk dipasarkan telah dikembangkan. Nilai tambah inilah yang sebetulnya bisa memperkuat ekonomi rumah tangga mereka.

Hasil identifikasi oleh Yakin, dkk (2019) dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta usaha perorangan yang memproduksi produk olahan dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang ada memiliki nilai yang tinggi namun masih ditemui bahwa kemasan produk agroindustri yang dihasilkan belum sesuai dengan standar dan tidak menarik, legalitas produk baik dalam

bentuk izin industri rumah tangga (IRT), serta sertifikat halal produk belum dimiliki. Kondisi demikian membuat produk mereka tidak dapat masuk ke pasar moderen serta pangsa pasar nasional maupun internasional, termasuk sebagai produk andalan untuk oleh-oleh wisatawan. Dengan demikian, standarisasi sertifikasi pangan industri rumah tangga (PIRT) produk UMKM menjadi sangat strategis, yang menurut Meliala, dkk (2014) bahwa pengembangan kualitas produk menjadi lebih baik (standardisasi) menjadi urgen untuk menghadapi berbagai persaingan pihak UMK dan agar mampu bertahan dan dapat memanfaatkan peluang yang ada maka UMKM harus meningkatkan daya saing perusahaan maupun daya saing produknya (Purwanggono, 2017; Iriyani, 2019).

Standardisasi adalah upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha. Sedangkan Sertifikasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dan produk telah memenuhi regulasi. Standardisasi dan sertifikasi memiliki beberapa manfaat, yaitu: (1) menjamin posisi UKM menjadi lebih aman agar terhindar dari pelanggaran hak kekayaan intelektual agar tidak dicuri, (2) menjamin dalam pengembalian modal atau investasi, (3) sebagai asset UKM untuk bisa mendapatkan proyek atau investor, (4) memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha, seperti melalui waralaba dan lisensi, (5) memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kualitas produk memang sesuai dengan apa yang dijanjikan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen, (6) melindungi konsumen dari produk yang kualitasnya rendah, (7) produk diakui kualitasnya secara internasional sehingga bisa diperdagangkan lintas negara (Dararizki, 2020).

Selain di atas, manfaat standarisasi masih cukup banyak, baik manfaat teknologi, ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, standarisasi membuat produk industri kreatif menjadi lebih efisien dan mampu meningkatkan daya saing dalam peprdagangan internasional. Karena dengan standarisasi ini mampu meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman, efisien dan baik untuk lingkungan. Karena itu, standarisasi yang dimaksud dalam artikel ini merupakan instrumen regulasi teknis yang dapat digunakan untuk melindungi produsen industri kreatif nasional dan kepentingan konsumen dalam negeri. Dengan regulasi tandarisasi produk industri berbasis teknis ini akan dapat dicegah produk yang tidak bermutu sebagai pengganggunya, termasuk mencegah barang impor bermutu rendah yang bisa merugikan konsumen. Secara umum, dengan adanya stnadarisasi mampu meningkatkan kesadaran produsen industri serta mampu meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing produk yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional (Prasetyo, 2017).

Dengan demikian, standardisasi produk olahan untuk memenuhi tuntutan pasar menjadi satu aspek penting untuk meningkatkan daya saing dan perluasan pasar sehingga pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tentang Fasilitasi Standarisasi Produk Agroindustri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Sesaot di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sangat strategis. Dengan demikian yang menjadi tujuan dari program pengabdian pada masyarakat ini adalah meningkatkan kapasitas pengusaha agroindusri dan standardisasi produk olahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) agar dapat bersaing dan produknya dapat dipasarkan ke pasar Modern. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut: 1) untuk meningkatkan kapasitas *pengusaha* agroindustri hasil hutan bukan kayu (HHBK) tentang pengelolaan usaha serta pentingnya legalitas usaha sehingga usahanya bisa lebih dapat dikembangkan, 2) untuk memfasilitasi standardisasi produk olahan/agroindustri yang dihasilkan dengan tampilan kemasan produk yang menarik sesuai dengan tuntutan pasar, memperoleh ijin produk industri rumah tangga (PIRT) serta sertifikat halal sehingga produk olahan tersebut bisa masuk pasar modern dan bersaing dalam pemasarannya. Selanjutnya dapat memberikan manfaat antara lain: 1) menjadi media penyebaran dan disiminasi penerapan Ipteks yang dimiliki Universitas Mataram untuk membangun membangun kehidupan masyarakat berkelanjutan; 2) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kapasitas kelembagaan dan pengelolaan usaha bagi pengusaha agroindustri hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta pentingnya legalitas usaha dengan memperoleh legalitas usaha (PIRT), dan 3) Terfasilitasinya pelaku usaha agroindustri HHBK yang potensial untuk memperoleh legalitas usaha dan standardisasi produk berupa kemasan produk yang menarik dan sesuai dengan tuntutan pasar, ijin Industri Rumah Tangga (IRT) dan sertifikasi halal sehingga produk-produk olahannya bagi pengusaha yang potensial sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat serta memiliki daya saing baik lokal, regional, maupun internasional.

METODE

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode pendidikan orang dewasa dengan metode partisipatif melalui penyampaian materi dan memfasilitasi penyusunan business plan kepada para pengusaha baik dalam bentuk Kelompok wanita tani, dan Kelompok Usaha Bersama, serta usaha produksi perseorangan di sekitar kawasan ekowisata hutan di desa Sesaot kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan yang telah dilakukan dalam kegiatan ini meliputi tahap-tahap persiapan koordinasi, koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan (pemerintah Desa dan pengusaha dan kelompok usaha dan/atau usaha perorangan dalam agroindustri atau produk olahan hasil hutan. Rangkaian kegiatan meliputi identifikasi dan sosialisasi kegiatan, pelatihan /penyuluhan, serta fasilitasi dan pendampingan pembuatan kemasan produk, dan fasilitasi pengurusan Pangan industri rumahtangga (PIRT) dan evaluasi kegiatan.

Penetapan Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan pada masyarakat khususnya pelaku usaha agroindustri atau produk olahan yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sekitar kawasan hutan Sesaot yang meliputi Desa Sesaot, Desa Buwun Jati, dan Desa Pakuan di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok. Wilayah ini juga memiliki potensi yang bagus untuk pengembangan ekowisata hutan serta usaha-usaha ekonomi yang terkait sehingga mempunyai potensi yang besar sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat di wilayah tersebut jika dikelola secara berkelanjutan dengan melakukan standarisasi produk agroindustri yang dikembangkan dengan adanya Pangan Industri Rumahtangga (PIRT) yang menjamin keamanan olahan pangan yang dihasilkan. Serangkaian kegiatan fasilitasi ini berlangsung dari 01 Agustus 2021 sampai dengan 18 Desember 2021.

Tim Pelaksana Kegiatan

Tim pelaksana kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini memiliki kualifikasi yang memadai dari segi pendidikan dan keahlian serta pengalaman yang relevan dengan topik kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi yang memadai dalam memfasilitasi pengusaha agroindustri atau produk olahan HHBK untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Dalam pelatihan dan fasilitasi dalam kegiatan pengabdian ini juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan Lembaga/Dinas yang terkait dengan Standarisasi dengan lembaga terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

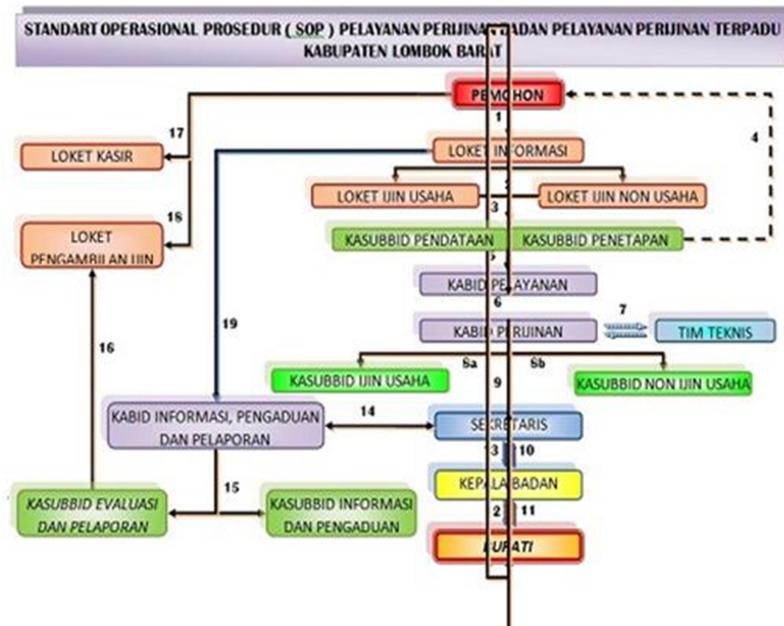
Kegiatan program pengabdian pada masyarakat yang didanai oleh dana PNPB tahun 2021 ini telah dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut.

Pertama: adalah Sosialisasi kegiatan dan koordinasi dengan kelompok sasaran, yang dilaksanakan pada Bulan September 2021 bertemu dengan Salah satu Pelaku Usaha yang sudah pernah memperoleh PIRT dan akan mengajukan ijin untuk produk baru, membicarakan khusus tentang identifikasi potensi pelaku usaha yang bisa difasilitasi tentang standarisasi produk olahan HHBK sekaligus menjadi fasilitator untuk mengurus kepentingan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pada pertemuan tersebut berhasil diidentifikasi pihak dan kelompok yang diundang dan dilibatkan dalam penyuluhan dan fasilitasi, termasuk jumlah undangan dan akomodasi yang disediakan oleh TIM untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dimaksud.

Kedua: Identifikasi pelaku usaha agroindustri/produk olahan sekitar kawasan hutan Sesaot. Selanjutnya dilakukan Kunjungan kedua yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 melakukan diskusi intensif di Kediaman Fasilitator yang dipercayakan di desa untuk memperoleh Gambaran Jumlah Peserta yang bersedia ikut setelah melakukan identifikasi dan menemui calon peserta fasilitasi standarisasi produk olahan HHBK. Pada kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah desa yang diwakili oleh Bapak

Sekretaris Desa sekaligus konfirmasi tentang waktu kegiatan fasilitasi, serta tempat pelaksanaan fasilitasi, yaitu di Aula Kantor Desa Sesaot.

Hasil Identifikasi diperoleh bahwa ada sekitar 18 orang pelaku UMK baik yang mewakili kelompok usaha maupun usaha perorangan yang menjadi peserta fasilitasi standarisasi produk olahan (agroindustri) mereka untuk selanjutnya diuruskan PIRT nya bagi yang memenuhi persyaratan.



Gambar 1. Prosedur Operasional Standar Pelayanan Terpadu di Kabupaten Lombok Barat

Ketiga: Konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Lombok Barat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Diperoleh informasi bahwa *standard operational procedure* (SOP) pelayanan perijinan dan Pelayanan Informasi terpadu di Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya, setelah melakukan konsultasi baik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, diperoleh gambaran tentang persyaratan dan langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh PIRT tersebut.

Keempat: Kegiatan berikutnya adalah kegiatan inti, yaitu pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi tentang Standarisasi Produk Olahan HHBK dengan menggunakan metode pendidikan orang dewasa melalui teknik diskusi dan tukar menukar pendapat dan pandangan secara partisipatif dan terarah. Peserta kegiatan tidak hanya diikuti oleh pengurus atau pengelola BUMDes, yang menjadi target utama tetapi juga *stakeholders* terkait terutama pihak-pihak yang ikut bekerja dan terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata Sesaot seperti pemerintah desa, pelaku dan pengelola usaha di kawasan, petani pesanggem, pemuda, sehat pihak-pihak terkait lainnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama sehari yaitu pada Hari Sabtu, 22 September 2021 bertempat di Aula Pertemuan Kantor Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang diikuti oleh 15 orang partisipan dan dihadiri oleh Sekretaris Desa Sesaot. Dalam pelaksanaannya, selain koordinasi dengan pihak kantor desa dan fasilitator lapangan, Tim juga dibantu oleh dua petugas administrasi pertemuan yaitu dua mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sesaot.

Materi utama yang diberikan dalam sosialisasi dan fasilitasi Standarisasi Produk Olahan Pangan HHBK ini dikelompokkan dalam 3(tiga) topik utama, yaitu: (1) Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah tangga (SP-PIRT), yang berisi tentang pentingnya perlindungan Konsumen, Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Pedoman Pemberian Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, dan Tata cara Pemberian SP-PIRT di Kabupaten Lombok Barat; (2) Kemasan, Label, dan Iklan Pangan: Jenis-Jenis Kemasan, Kriteria dan Syarat Kemasan yang Baik, Keterangan Minimal yang harus ada dalam Label pangan/Kemasan, Ragam Bentuk Kemasan, dan (3) Sertifikasi Halal dari MUI

yang mencakup Jaminan Produk Halal, Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Tarif Layanan Badan Layanan Umum terbaru termasuk untuk pernyataan Halal dari pelaku UMK yang bisa didanai dari APBN, APBD, Dana Kemitraan, Hibah, Dana Bergulir, dan lain-lain sehingga pelaku UMK tidak harus mengeluarkan biaya, serta Tatacara memperoleh Sertifikat Halal.



Gambar 2.
Kegiatan Fasilitasi Standardisasi Produk Olahan

Sosialisasi dan fasilitasi dilakukan dengan presentasi *powerpoint* dengan menggunakan LCD, selanjutnya dilakukan dengan diskusi terarah tentang materi yang disampaikan. Selain itu, forum digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha khususnya terkait dengan pengurusan PIRT dan Sertifikat Halal. Peserta memberikan masukan dan saran-saran yang konstruktif. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi dengan mengamati antusiasme dan manfaat yang dirasakan oleh peserta dari pemaparan yang sudah disampaikan. Selain itu, forum juga berhasil menggali potensi dan kegiatan usaha yang ada di kawasan serta masalah-masalah yang dihadapi, serta hal-hal yang ingin dikembangkan ke depan.

Pada akhir acara setelah proses tukar pikiran secara terarah dan partisipatif, tim mengajukan beberapa pertanyaan sejauh mana materi-materi yang telah disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh partisipan dan bermanfaat bagi peserta. Hasil evaluasi di akhir kegiatan menunjukkan bahwa sejak kehadiran peserta yang tepat waktu, penyampaian materi yang santai diselingi dengan permainan, serta dinamika yang berkembang dan data serta informasi yang tergalil selama pertemuan maka bisa dikatakan bahwa penyuluhan dan fasilitasi ini adalah sangat berhasil. Keberhasilan kegiatan didukung oleh kesesuaian topik yang dilakukan dengan kebutuhan pelaku UMK di lokasi kegiatan yang belum mengembangkan rencana bisnis untuk usaha yang dijalankan. Bahan-bahan yang diberikan merupakan sesuatu yang relatif baru sehingga menarik perhatian peserta sehingga mendorong peserta untuk menggali data dan informasi serta memberikan saran-saran yang konstruktif dalam pengembangan kawasan ekowisata sesaot ke depan.

Sejak perencanaan, koordinasi, pelaksanaan penyuluhan termasuk fasilitasi pelaku UMK serta evaluasi kegiatan berjalan dengan lancar dan baik menjadi respon yang cukup positif dari pelaku UMK dan aparat desa yang terlibat dan ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan merupakan sesuatu yang baru dan penting untuk ditindaklanjuti dalam realisasi PIRT yang diinginkan. Dengan demikian, kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMK dalam pentingnya standarisasi produk Olahan HHBK dalam pengembangan usaha dan pasar produk mereka.

Kelima: Fasilitasi Pengurusan Ijin PIRT bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat ke dinas terkait. Setelah melakukan identifikasi keinginan pelaku UMK yang hadir dalam fasilitasi. Maka bagi mereka yang sudah mengisi formulir dan memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk pengurusan PIRT maka selanjutnya diusulkan untuk diterbitkan PIRT nya. Jumlah peserta yang berminat untuk difasilitasi pengurusan PIRT nya adalah sebanyak 13 pelaku usaha perseorangan yang terdiri dari 2(dua) kelompok usaha dan 11 (sebelas) usaha perseorangan. Produk-produk olahan yang dihasilkan berupa Kopi bubuk, dan keripik/Kerupuk pisang manis, terigu, talas, dan singkong.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam kaitan dengan standarisasi produk olahan HHBK kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK) ini dinilai berhasil. Fenomena dan dinamika yang berkembang dalam proses kegiatan pengabdian ini mencerminkan adalah munculnya dan terungkapnya kemampuan dan kapasitas kognitif dan afektif dari pengelola UMK ini. melalui kegiatan penyuluhan dan fasilitasi

ini telah dihasilkan realisasi melengkapi persyaratan untuk keperluan PIRT. Apakah pemahaman dan peningkatan wawasan tentang pentingnya standarisasi produk olahan agroindustri dan bersedia memenuhi persyaratan untuk pengajuan PIRT dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Tim telah menyatakan kesediaan untuk dihubungi jika ada hal-hal yang didiskusikan dan difasilitasi dalam Penyelesaian PIRT yang sudah dicanangkan. Selanjutnya, Tim melakukan desiminasi hasil kegiatan ini dalam bentuk publikasi ilmiah untuk menjadi referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama.

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini disebabkan oleh beberapa factor, yaitu: (1) Pemilihan topik sesuai dengan kebutuhan sasaran kegiatan yaitu pelaku Usaha Kecil dan Mikro sehingga dari awal perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan mendapat respon yang baik dan positif; (2) ada kesungguhan yang kuat dari peserta khususnya para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan hasil dan penerimaan yang diperoleh dari usaha ekonomi yang ditekuni yang ditunjukkan dengan kehadiran yang tepat waktu, serta menindaklanjuti dengan pengurusan dokumen PIRT; (3) Adanya bantuan dan kerja sama yang baik antara Tim pengabdian dengan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kawasan sekitar Sesaot yang menyediakan waktu dan tenaga untuk sosialisasi dan menyebarkan undangan, mengurus sarana dan fasilitas pertemuan serta pengadaan akomodasi pertemuan sehingga pertemuan berjalan secara kondusif dan lancar. Hal ini sejalan dengan pendapat Daraba (2015) bahwa keberhasilan beberapa kelompok usaha antara lain dipengaruhi oleh penguasaan teknik atau cara mengelola pemberdayaan dari para pendamping kegiatan, kualitas layanan bimbingan yang diberikan serta dukungan profesional dari para pendamping sehingga usaha yang dilakukan bisa berhasil.

Meskipun rangkaian kegiatan dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan serta fasilitasi standarisasi produk olahan HHBK berjalan dengan lancar dan baik, tetapi terdapat masalah-masalah yang dijumpai di lapangan antara kegiatan sosial masyarakat yang pada saat akan dilaksanakannya sosialisasi dan fasilitasi yaitu Perayaan Maulid dan Persiapan Desa dalam rangka menerima Kunjungan Menparinkraf ke Desa Sesaot. Masalah lainnya juga adalah dengan adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan perkembangan usaha kecil di lokasi pengabdian terganggu karena kunjungan wisata yang sangat minim sekali, bahkan tidak ada sehingga peluang pasar produk menjadi menurun drastis. Keadaan covid 19 juga membuat kegiatan mengumpulkan pelaku usaha untuk kegiatan fasilitasi menjadi sedikit tertunda. Selanjutnya, karena perbedaan latar belakang dari peserta yang berbeda baik dalam pendidikan maupun pengalaman sehingga tidak semua peserta bisa aktif dan berpartisipasi, dan meneruskan pengurusan PIRT nya, tetapi kehadiran mereka tentu tetap bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan mereka tentang perlunya standarisasi produk olahan HHBK untuk memenuhi permintaan wisatawan serta pasar modern domestik bahkan manca negara. Hal ini diperkuat oleh Bhayangkari (2012) tentang pentingnya standarisasi untuk meningkatkan nilai yang diinginkan oleh pelanggan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berjudul Fasilitasi Standarisasi Produk Agroindustri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Sesaot Di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kegiatan pengabdian pada masyarakat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat meningkatkan aspek kognitif dan afektif dari peserta khususnya para pelaku UMK yang berkaitan dengan standarisasi produk Olahan HHBK dengan perlu adanya sertifikat PIRT dan Sertifikat Halal untuk produk yang dihasilkan, Kegiatan pengabdian ini telah menjadi wahana desiminasi hasil penelitian di universitas Mataram kepada masyarakat pengguna yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi pengurusan PIRT bagi produk olahan yang dihasilkan, sehingga produk mereka bisa berdaya saing dalam pemasaran produk baik domestik maupun internasional, Hubungan yang dinamis dan saling mengisi antara perguruan tinggi dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya perlu dikembangkan terus untuk

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan maka diberikan beberapa saran yaitu Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh untuk mengelola usaha dengan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, Kepada peserta fasilitasi yaitu pengelola UMK dapat memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan PIRT, Proses pembelajaran merupakan proses jangka panjang dan berkesinambungan, oleh karena itu kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini harus terus dilaksanakan agar hasil-hasil kajian dan penelitian di perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perbaikan kesejahteraan hidup mereka, khususnya dalam kaitan dengan kegiatan fasilitasi ini bisa dilanjutkan dengan proses sertifikasi halal bagi produk-produk yang telah memperoleh PIRT.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram yang mendukung pendanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Aji, Gutomo Bayu; Rusida Yuliyanti, Joko Suryanto, Andini Desita Ekaputra Tanjung Saptono, Hasriani Muis, 2015. Sumbangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa terhadap Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan: Studi Kasus. Kerjasama penelitian antara: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI dengan Kemitraan. The Partnership for Governance Reform. Jakarta.
- Bhayangkari, Sylvia Kartika Wulan, 2012. Penerapan Standardisasi dan Adaptasi Sebagai Upaya Pengembangan Strategi Produk pada Pemasaran Internasional. *Mankeu*.1(3):245-258.
- Meliala, Suranta Andi; Nazaruddin Matondang , Rahmi M Sari, 2014. Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berbasis Kaizen. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 13(2):641- 664.
- Daraba, Dahyar, 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan PolongBangkeng Utara Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan. *Sosiohumaniora*, 17(2): 168- 169.
- Dararizki, Kinanthi, 2020, Pentingnya Standardisasi & Sertifikasi sebagai Bukti Formal Kualitas. UKM Indonesia.** <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/297>. diakses tgl 23 April 2021.
- Departemen Kehutanan, 2009. Pangan dari Hutan (Kontribusi Sektor Kehutanan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional), Makalah pada Seminar Nasional dalam rangka “Hari Pangan Sedunia, 12 Oktober 2009”, Jakarta, 1 Oktober 2009. http://www.dephut.go.id/uploads/files/DEPHUT_Makalah_HPS.pdf diakses 26 April 2021
- Hasan, Rubangi Al ; Yumantoko, 2016, Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan (Studi Kasus di Pulau Lombok). Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu: Lingsar, Lombok Barat, NTB. <http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosiding2/fisip201224.pdf>. Diakses 17 Maret 2020.
- Iriyani, Dwi, 2019, Penguatan dan Peningkatan Daya Saing pada UMKM sebagai Strategi Menghadapi MEA. dwiiriyani@ut.ac.id. <http://repository.ut.ac.id/4558/1/2015-dn-010.pdf>. Diakses 20 Pebruari 2020.
- Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri kehutanan Republik Indonesia. Nomor: P. 16/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Umum Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan. Jakarta.
- Prasetyo, P. Eko, 2017. Standarisasi dan Komersialisasi Produk Industri Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu dan Call for Papers Unisbank Ke-3. ISBN: 9-789-7936-499-93. Diakses 21 Oktober 2021.

- Purwanggono, Bambang, 2017, Pentingnya Standardisasi Untuk Meningkatkan Daya Saing. <https://www.uui.ac.id/pentingnya-standardisasi-untuk-meningkatkan-daya-saing/>. Diakses 15 April 2021.
- Yakin, Addinul, 2005. Community Involvement and Environmental Management of Rinjani National Park, Lombok Island, In book: SUSTAINABLE LOMBOK: The Rich Nature and Rich People in the 21st Century (pp.93-120) Universitas Mataram Press. Mataram.
- Yakin, Addinul dan Jamal Othman, 2003. Forest Resource and Policy at the Age of Regional Autonomy in Indonesia. Paper yang dipresentasikan pada the 2-day International Seminar on "Sustainable Economic, Business, and Social Development in an Era of Globalization", 13/10/2003-14/10/2003 at Equatorial Hotel, Bangi, Selangor, Malaysia.
- Yakin, Addinul, 2015. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori, Kebijakan, dan Aplikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. Edisi Baru Cetakan Pertama. Akademika Pressindo Jakarta.
- Yakin, Addinul., Sukardi, L, Amirudin, Yusuf, M, 2016. Analisis Strategi Penghidupan dan Kesejahteraan Ekonomi Rumah tangga Sekitar Hutan Bagi Pengembangan Kehutanan Berkelanjutan: Studi Kasus di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. Laporan Penelitian PNBPU Universitas Mataram.
- Yakin, A., Sukardi, S., Amiruddin, A., & Sa'diyah, H., 2019. Peningkatan Kapasitas BUMDES dalam Penyusunan Business Plan bagi Pengelolaan Kawasan Ekowisata Hutan Berkelanjutan di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Abdi Mas TPB Unram*, 1(1):97-107. <https://doi.org/10.29303/amtpb.v1i1.17>.